

# LKiIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

# 2024



Dishub Kota Probolinggo



+62 823-4170-2000



## KATA PENGANTAR

Dalam Tugas pokok dan fungsi utama dari lembaga pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pelayanan publik yang baik akan mempunyai efek yang sangat luas bagi masyarakat, termasuk peningkatan kepercayaan, pembentukan lembaga pemerintah yang berkualitas dan berwibawa dan tentunya akan menciptakan sinergi sumber daya pembangunan dari berbagai stake holder.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sesuai dengan Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan/penyelenggaraan pemerintahan pada sektor Transportasi, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2024 ini semoga menjadi sarana evaluasi dan dapat dilaksanakan untuk mengoptimalkan kinerja dinas yang lebih baik lagi dimasa mendatang.

Probolinggo, 1 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PROBOLINGGO

Dr. AGUS EFENDI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19730909 199201 1 001



---

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>iii</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Gambaran Umum Organisasi .....	I-1
1.2. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi .....	I-5
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>II-7</b>
2.1. Rencana Strategis.....	II-7
2.2. Program dan Kegiatan.....	II-9
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III-17</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	III-17
3.2. Realisasi Anggaran .....	III-31
<b>BAB IV.PENUTUP .....</b>	<b>IV-38</b>
4.1. Kesimpulan .....	IV-38
4.2. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja .....	IV-39



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran .....	II-9
Tabel 2.2 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.....	II-10
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	II-16
Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja dari Tujuan Dinas Perhubungan Tahun 2024 .....	III-18
Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 .....	III-18
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja .....	III-19
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 s.d. Akhir Tahun 2024 .....	III-20
Tabel 3.5. Alokasi Per- Sasaran Pembangunan .....	III-20
Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	III-21
Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	III-23
Tabel 3.8. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan .....	III-24
Tabel 3.9. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/KegagalanPencapaian Pernyataan Kinerja .....	III-24
Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024 .....	III-26
Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja .....	III-27
Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 s.d. Akhir Tahun 2024 .....	III-27
Tabel 3.13. Alokasi Per- Sasaran Pembangunan .....	III-28
Tabel 3.14. Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	III-29
Tabel 3.15. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	III-30
Tabel 3.16. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan .....	III-30
Tabel 3.17. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/KegagalanPencapaian Pernyataan Kinerja .....	III-31
Tabel 4.1. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	IV-38

## DAFTAR BAGAN

Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI .....	I-1
--------------------------------------	-----



---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Gambaran Umum Organisasi**

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi Pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), fungsi Pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu di sektor pembangunan (development function), dan fungsi Pemerintahan Umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation and function), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perijinan dan lain-lain. Dengan demikian, terhadap 3 (tiga) unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga Dinas Perhubungan Kota Probolinggo di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna. Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53



---

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

### **1.1.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo, maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

#### **A. Tugas Pokok**

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perhubungan.



---

## B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

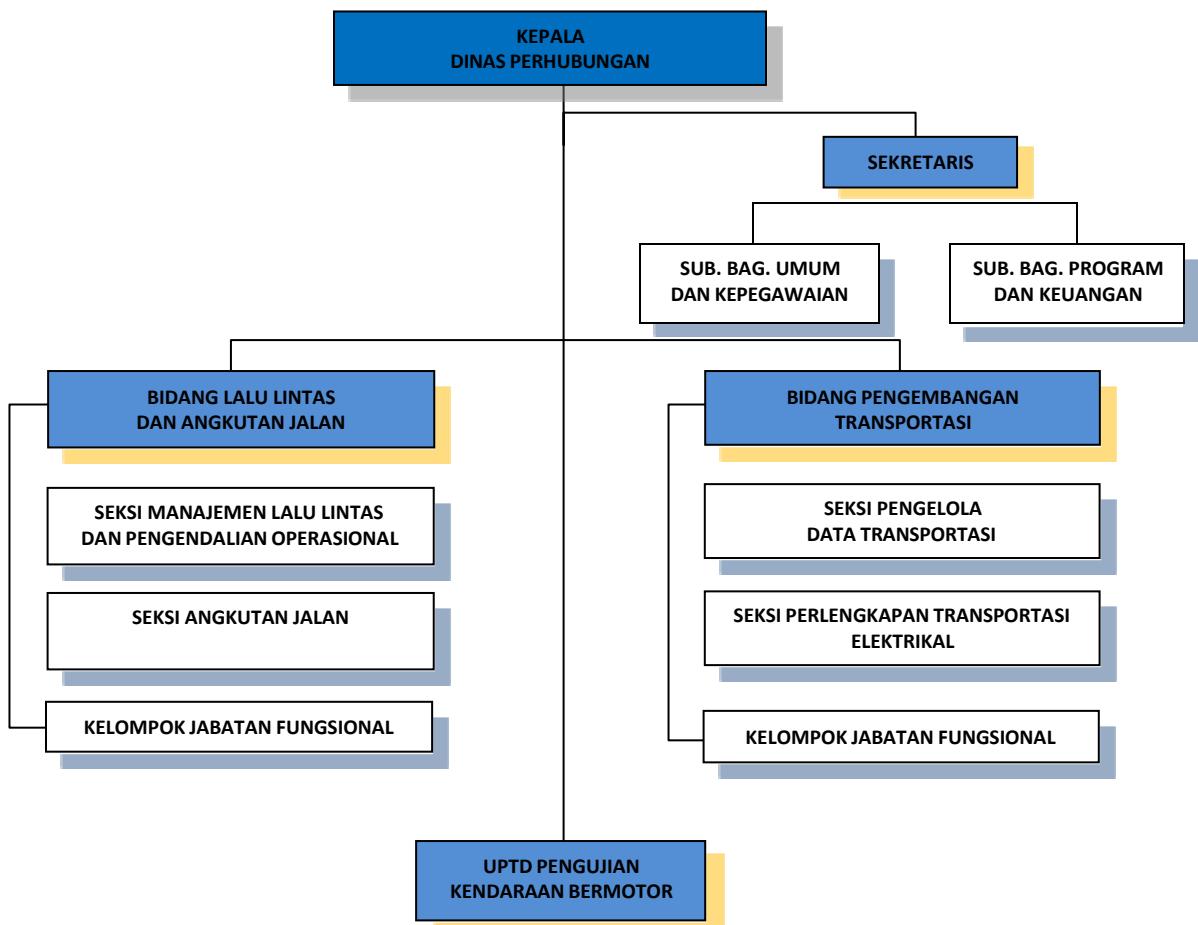
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perhubungan;
- c. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 1.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

- Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo dipimpin oleh Kepala Dinas, yang membawahi :
1. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Program dan Keuangan;
  2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri atas Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional, Seksi Angkutan Jalan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Bidang Pengembangan Transportasi terdiri atas Seksi Pengelola Data Transportasi, Seksi Perlengkapan Transportasi Elektrikal dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor.



**Gambar 1.1.**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO**



### 1.1.3. PEGAWAI

Pegawai Dinas Perhubungan Kota Probolinggo per Desember 2024 berjumlah 272 (dua ratus tujuh puluh dua) orang, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 49 (empat puluh tujuh) orang
2. Pegawai Non ASN sebanyak 70 (tujuh puluh) orang
3. Tenaga Juru Parkir sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) orang



## 1.2. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH INSTANSI

Dalam masa proses pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2024 secara langsung pada rencana fisik sarana dan prasarana perhubungan berjalan kondusif. Sehingga perangkat daerah khususnya Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dapat melakukan penganggaran dan perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan program dan perencanaan serta aturan dan kebijakan yang telah ditentukan.

Dalam upaya peningkatan pembangunan ada beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Penyediaan sarana transportasi umum merupakan sebuah solusi. Namun tidak memiliki anggaran yang cukup dan memadai untuk menyediakan sarana transportasi yang terintegrasi, aman, dan nyaman.
- b. Pada saat ini Kemacetan lalu lintas di Kota Probolinggo pada waktu jam sibuk (peak hour) dengan adanya faktor yang mendorong karena kecenderungan pergerakan kendaraan dari daerah pinggiran dan/atau perbatasan Kota Probolinggo menuju ke daerah pusat perkantoran, sentra usaha/pasar/bisnis, sekolah dan sebagainya.
- c. Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh sektor industri dan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor, dengan faktor yang mempengaruhi adalah karena banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan.
- d. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum, dimana faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi angkutan umum yang belum memenuhi harapan masyarakat, sehingga banyak pengguna jasa transportasi beralih ke ojek online dan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi.
- e. Belum optimalnya fungsi jaringan jalan kota yang difungsikan sebagai jaringan transportasi dari segi dimensi maupun daya dukung jalan.
- f. Belum terkonsepnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi baik dari ketersediaan dan fungsinya.



- 
- g. Belum optimalnya sistem operasional dalam pengelolaan dan penataan penyelenggaraan perparkiran, dengan faktor yang mempengaruhi adalah masih kurangnya kapasitas ruang parkir.
  - h. Belum optimalnya kapasitas kompetensi SDM Perhubungan terutama dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang IT Perhubungan.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024**

##### **2.1.1. Visi**

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Pelayanan bidang perhubungan/transportasi utamanya angkutan umum yang beroperasi dalam kota membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah terutama dalam hal peremajaan armada angkutan sehingga pelayanan angkutan umum mempunyai peranan yang sangat besar, bagi masyarakat golongan bawah, keberadaan angkutan umum berpengaruh terhadap perkembangan volume lalu lintas. Kualitas pelayanan angkutan umum masih sangat rendah, sehingga angkutan umum menjadi pilihan terakhir ketika masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Rendahnya penggunaan angkutan umum dan tingginya intensitas kendaraan pribadi serta penggunaan sepeda motor menyebabkan perkembangan volume lalu lintas menjadi sangat tinggi dan pada jalan-jalan tertentu mengalami kepadatan lalu lintas yang tinggi pula. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam kurun waktu 2019– 2024 mengikuti Visi Walikota Probolinggo :

**“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH  
BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN  
BERKELANJUTAN ”**



## **2.1.2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam upaya mewujudkan Visi Walikota Probolinggo, menentukan Misi ke 3 dalam RPJMD 2019-2024 yaitu :

**“ Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang BerkelaJutan ”**

## **2.1.3. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atas implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada sasaran RPJMD pada Misi Ke Tiga dan Tujuan Pertama yaitu Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang BerkelaJutan, untuk masa mendatang. Adapun tujuannya Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

**“ Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Insfrastruktur ”**

## **2.1.4. Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2019 - 2024 yaitu : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kota guna menunjang upaya peningkatan produktifitas ekonomi dan pelayanan dasar. Maka Dinas Perhubungan menentukan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
2. Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan.



**Tabel 2.1. Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur	1. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo; 2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo;
		2. Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan; 4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan.

## 2.2 Program dan Kegiatan

Program adalah sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit dan didalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada suatu tujuan yang sama. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2024 maka program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2024 telah mengalami perubahan berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan telah disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo terdiri Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	<b>PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ)</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
		<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
			Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota

Berdasarkan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 yang mengalami perubahan dan sudah disesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 serta kebutuhan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Perubahan pada Dinas Perhubungan Tahun 2024, maka dibutuhkan dana sebesar Rp. 28.029.846.738,- Dana tersebut terdiri 2 (dua) sumber dana yaitu:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kota Probolinggo, sebesar Rp. 26.429.283.432,-
2. Dana Insentif Fiskal sebesar Rp. 945.049.206,-

Sebagaimana terlampir dalam tabel 2.2 berikut :



**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.15	<b>URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN</b>					
2.15.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Percentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	Dinas Perhubungan	98%	<b>7.683.721.943</b>	<b>DAU</b>
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Dinas Perhubungan	90%	<b>14.317.900</b>	<b>DAU</b>
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	6 Dokumen	12.288.300	<b>DAU</b>
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	7 Dokumen	2.029.600	<b>DAU</b>
2.15.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan</b>		<b>100%</b>	<b>5.712.792.596</b>	<b>DAU</b>
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	531 Orang/Bulan	5.665.262.596	<b>DAU</b>
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	12 Dokumen	42.130.000	<b>DAU</b>
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Perhubungan	7 Laporan	5.400.000	<b>DAU</b>
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai ketentuan</b>		<b>100%</b>	<b>11.350.000</b>	<b>DAU</b>
	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	11.350.000	<b>DAU</b>
2.15.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan</b>		<b>100%</b>	<b>19.638.000</b>	<b>DAU</b>
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Percentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Dinas Perhubungan	6 orang	19.638.000	<b>DAU</b>
2.15.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>		<b>100%</b>	<b>491.992.000</b>	<b>DAU</b>
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan	100%	111.042.000	<b>DAU</b>
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas Perhubungan	100%	133.950.000	<b>DAU</b>
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Perhubungan	100%	26.686.000	<b>DAU</b>
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	Dinas Perhubungan	36 Eksemplar	3.600.000	<b>DAU</b>
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan Tamu	Dinas Perhubungan	100%	47.495.000	<b>DAU</b>
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	100%	169.219.000	<b>DAU</b>



2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi		100%	967.045.747	DAU
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Dinas Perhubungan	100%	5.042.500	DAU
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Perhubungan	100%	217.238.700	DAU
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Perhubungan	100%	31.400.000	DAU
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinas Perhubungan	100%	713.364.547	DAU
2.15.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase BMD yang terpenuhi</b>		<b>100%</b>	<b>466.585.700</b>	<b>DAU</b>
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Percentase Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi layak	Dinas Perhubungan	1	43.534.500	DAU
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Percentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak	Dinas Perhubungan	31	384.121.200	DAU
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Percentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	Dinas Perhubungan	17	21.930.000	DAU
2.15.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Percentase Aset Tetap Lainnya dalam kondisi baik	Dinas Perhubungan	4	17.000.000	DAU
2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana Perlengkapan jalan sesuai standar Kementerian Perhubungan</b>		<b>90%</b>		<b>DAU</b>
		Prosentase Penurunan Angka Pelanggaran Angkutan Jalan		11%		
		Prosentase Ruas Jalan yang terlayani Trayek Angkutan Kota		20%		
		Prosentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala		98%		
		Prosentase Pemenuhan Dokumen Kajian Bidang Perhubungan		20%		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	90%	16.685.286.895	BKK
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan yang terbangun	Dinas Perhubungan	3	295.022.000	DAU
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan alat perlengkapan jalan elektrikal	Dinas Perhubungan	53	950.829.306	DAU
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	Dinas Perhubungan	1500	15.439.435.589	DAU
2.15.02.2.04	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Percentase pengawasan pengelolaan parkir di Kota Probolinggo</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>90%</b>	<b>674.200.000</b>	<b>DAU</b>
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan yang masuk fasilitas parkir angkutan barang	Dinas Perhubungan	12 Laporan	674.200.000	DAU
2.15.02.2.05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Percentase Kendaraan yang Lulus Uji/laik jalan</b>	<b>UPT Pengujian Kendaraan</b>	<b>92%</b>	<b>518.371.500</b>	<b>DAU</b>



			Bermotor			
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data kendaraan wajib uji	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	8250 Unit	30.700.000	<b>DAU</b>
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji elektronik yang tersedia	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	2500 set	200.000.000	<b>DAU</b>
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian yang dipelihara	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	9 Unit	171.665.000	<b>DAU</b>
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang lulus uji/laik jalan	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	8892 Unit	116.006.500	<b>DAU</b>
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jaringan jalan di wilayah kota</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>77%</b>	<b>2.444.802.100</b>	<b>DAU</b>
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan LLAJ	Dinas Perhubungan	83 Lokasi	2.201.464.000	<b>DAU</b>
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembahasan kebijakan LLAJ	Dinas Perhubungan	8 Kebijakan	4.500.000	<b>DAU</b>
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Presentase Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	70%	238.838.100	<b>DAU</b>
<b>2.15.02.2.07</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Pelaku Usaha yang taat Andalalin</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>30%</b>	<b>10.189.500</b>	<b>DAU</b>
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan Andalalin sesuai rekomendasi	Dinas Perhubungan	10 Pelaku Usaha	10.189.500	<b>DAU</b>
<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Angkutan Penumpang umum di kota probolinggo</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>13,17%</b>	<b>5.250.000</b>	<b>DAU</b>
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan orang dan angkutan barang	Dinas Perhubungan	5253 Kendaraan	5.250.000	<b>DAU</b>
<b>2.15.02.2.11</b>	<b>Penetapan rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Jaringan Trayek Perkotaan yang ditetapkan</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>15.69%</b>	<b>4.450.000</b>	<b>DAU</b>
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan	Dinas Perhubungan	50 Orang	4.500.000	<b>DAU</b>
<b>2.15.02.2.14</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>204 Dokumen</b>	<b>1.575.000</b>	<b>DAU</b>
2.15.02.2.14.01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Jumlah dokumen perusahaan angkutan jalan yang melakukan pengurusan ijin angkutan orang	Dinas Perhubungan	12 Laporan	1.275.000	<b>DAU</b>



	Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	dalam trayek				
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ijin penyelanggaraan angkutan orang dalam trayek yang diterbitkan	Dinas Perhubungan	12 Laporan	300.000	<b>DAU</b>
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Prosentase Jumlah Pelanggaran Kapal &lt;7GT</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>2%</b>	<b>1.999.800</b>	<b>DAU</b>
2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kapal <7GT yang memenuhi persyaratan laik kelautan	Dinas Perhubungan	52 Orang	1.999.800	<b>DAU</b>
2.15.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan/Pemilik Kapal <7GT yang Mengikuti Pembinaan	Dinas Perhubungan	60 Orang	1.999.800	<b>DAU</b>
<b>Jumlah Total</b>					<b>28.029.846.738</b>	



## 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja ini akan diketahui sasaran (target) yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Oleh karenanya Perjanjian Kinerja ini adalah bentuk pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian target pada sebuah instansi pemerintah (penerima mandat).

Adapun Indikator Kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dapat dilihat dari perjanjian kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini :

**Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	70
		2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	20
2.	Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan	100%
		4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan	89%



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Hasil capaian kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengembangkan visi dan misinya, sebab melalui penetapan hasil capaian kinerja akan dapat diketahui tingkat keberhasilan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo menetapkan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : "Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur"

Sasaran : 1. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan  
2. Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan.

Adapun target dan capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan

#### **a. Perbandingan Target dengan Realisasi**

Berdasarkan penetapan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sampai akhir Tahun 2024, maka dihasilkan capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja dari Tujuan Dinas Perhubungan Tahun 2024**

No.	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	Capaian Kinerja	TARGET TAHUN 2024	Capaian Kinerja
1	Persentase Infratruktur Berkualitas Baik	98%	98,09%	100%	95%

**Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase
1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	70%	82,79%	118%
2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	20%	0%	0%

Analisis Pencapaian Kinerja :

1. Pada IKU **“Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang tersedia di Kota Probolinggo”** dengan target 70% dan realisasi 82,79% dari Jumlah ruas jalan kota yang terpenuhi sarana dan prasarana LLAJ Tahun 2024 sebanyak 178 ruas jalan dibanding dengan Total ruas jalan seluruh Kota Probolinggo sebanyak 215 ruas jalan dikalikan 100 persen maka capaian persentasenya sebesar 82,79% berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ Ruas Jalan Kota yg terpenuhi Sarana LLAJ Th.n}}{\Sigma \text{ Seluruh Ruas Jalan Kota}} \times 100 = \frac{178}{215} \times 100 = 82,79\%$$

Jadi Capaian Persentase = Realisasi / Target x 100

$$= 82,79 / 70 \times 100$$

$$\text{sebesar} = 118\%$$



2. Pada IKU “**Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo**” dengan target turun 20% dan realisasi 0% dari Jumlah Pelanggaran pada Tahun 2024 dikarenakan tidak melaksanakan kegiatan Operasi Gabungan yaitu regulasi dari Kepolisian yang menghapus penindakan tilang manual dan Dinas Perhubungan tidak boleh mengadakan Operasi Penertiban secara individual (berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) guna mengurangi unsur pemungutan liar di lapangan, maka capaian persentasenya sebesar 0% berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Pelanggaran Angk.Jalan Th.n} - \sum \text{Pelanggaran Angk.Jalan Th.(n-1)}}{\sum \text{Pelanggaran Angk.Jalan Th.(n-1)}} \times 100 = \frac{(0)}{20} \times 100 = 0\%$$

Jadi Capaian Persentase = Realisasi / Target x 100  
= 0 / 20 x 100  
sebesar= 0 %

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu**

Bila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun lalu (2023) disajikan dengan indikator yang sama dalam tabel berikut :

**Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	
		Th. 2023	Th. 2024
1. Persentase Sarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	70%	60,93 %	82,79 %
2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	20%	46,43 %	0%



### **c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 sampai dengan akhir periode Renstra**

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Perubahan Renstra 2019 - 2024) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 s.d. Akhir Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra (Th. 2024)	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. 2024	Tingkat Kemajuan
1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	70%	60,93 %	82,79 %	135 %
2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	20%	46,43%	0%	0 %

### **d. Alokasi per Sasaran Pembangunan**

Untuk mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp. 28.029.846.738,- dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.5. Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp.)	Prosentase Anggaran terhadap anggaran Perangkat Daerah
1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	17.442.496.495	62,22 %
2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	2.901.628.500	10.35%



### e. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

**Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo</b>	70%	82,79%	135%	17.442.496.495	17.303.275.445	99%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)						
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	90	90	101	16.685.286.895,00	16.559.861.001,00	99,25
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1	1	100	295.022.000,00	291.703.776,00	98,88
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	54	54	100	950.829.306,00	923.742.130,00	97,15
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1900	1499	79	15.439.435.589,00	15.344.415.095,00	99,38
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota</b>	35	100%	128,63%	238.838.100,00	235.980.084,00	98,80%
Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	35	100%	134,05%	238.838.100,00	235.980.084,00	98,80%
<b>Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo</b>	0%	0%	0%	2.885.414.000,00	2.839.309.338,00	98,40%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)						
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan	90%	132.27	146.97	696.003.000	680.962.750	97.83%



<b>Pembangunan Fasilitas Parkir</b>							
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	12 Laporan	100%	674.200.000,00	654.851.150,00	97,13%	
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota</b>	100%	100%	100%	<b>2.205.964.000</b>	<b>2.179.208.188,00</b>	<b>98,79 %</b>	
<i>Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota</i>	12 Laporan	12 Laporan	133%	2.201.464.000,00	2.174.933.188,00	98,79%	
<i>Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota</i>	6 Laporan	8 Laporan	125%	4.500.000	4.275.000,00	95,00%	
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	30%	110%	367%	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>100%</b>	
<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten/Kota</i>	15 laporan	15 laporan	100%	5.250.000	5.250.000	100%	
<b>Penetapan rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	15 %	15%	100%	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.338.750,00</b>	<b>97,50%</b>	
<i>Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek</i>	3 dokumen	5 dokumen	167%	4.450.000,00	4.338.750,00	97,50%	

<i>Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>							
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	30 %	30%	100%	1.575.000,00	1.510.000,00	95,87%	
Fasilitasi penuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	10 unit	10 unit	100%	1.275.000,00	1.210.000,00	94,90%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%	300.000,00	300.000,00	100%	

#### **f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	135%	99%	
2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	0%	<b>98,40%</b>	

**g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan dan Kegagalan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan**

**Tabel 3.8. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisa Penyebab
1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	70%	82,79%	Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas Jalan sudah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan minim kerusakan dikarenakan pemeliharaan sudah dilaksanakan secara berkala
2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	20%	0%	Dikarenakan tidak melaksanakan kegiatan Operasi Gabungan dikarenakan regulasi dari Kepolisian yang menghapus penindakan tilang manual dan Dinas Perhubungan tidak boleh mengadakan Operasi Penertiban secara individual (berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) guna mengurangi unsur pemungutan liar di lapangan

**h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

**Tabel 3.9.**  
**Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia Di Kota Probolinggo	70%	82,79%	<p>Untuk memenuhi Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo melaksanakan beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pembangunan Prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota</li> <li>➢ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;</li> <li>➢ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.</li> </ul> </li> <li>b. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;</li> </ul> </li> </ul></li></ol>
2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	20%	0%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul> </li> <li>b. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jakan Kabupaten/Kota</li> <li>➢ Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota</li> <li>➢ Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota</li> </ul> </li> <li>c. Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau</li> </ul> </li> </ul></li></ol>

			<p>Barang Antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten/Kota</p> <p>d. Penetapan rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>e. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</li> <li>➢ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>
--	--	--	---

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan

**a. Perbandingan Target dengan Realisasi**

**Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan	100%	67%	67%
4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan	89%	23%	26%

Analisis Pencapaian Kinerja :

1. Pada IKU **“Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan”** dengan target 100% dan realisasi 103% dari Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji Tahun 2024 sebanyak 6800 Unit dibanding dengan Jumlah Kendaraan yang Wajib Uji sebanyak 10116 Unit dikalikan 100 persen maka capaian persentasenya sebesar 67% berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ Kendaraan yang Lulus Uji}}{\Sigma \text{ Kendaraan yang Wajib Uji}} \times 100 = \frac{6800}{10116} \times 100 = 67\%$$

$$\begin{aligned}
 \text{Jadi Capaian Persentase} &= \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100 \\
 &= 67 / 100 \times 100 \\
 &\text{sebesar} = 67\%
 \end{aligned}$$

2. Pada IKU **“Percentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan”** dengan target turun 89% sedangkan realisasi 23% dari Jumlah Nelayan/pemilik Kapal dibawah 7GT Yang Mengikuti pembinaan keselamatan Angkutan Laut Tahun 2024 sebanyak 30 Nelayan/Pemilik Kapal dibanding dengan Jumlah Undangan Pembinaan tersedia Tahun 2024 sebanyak 30 Undangan Pembinaan dikalikan 100 persen maka capaian persentasenya sebesar 25% berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ nelayan/pemilik kapal} < 7GT \text{ yang mengikuti pembinaan}}{\Sigma \text{ undangan Pembinaan Nelayan/pemilik kapal} < 7GT} \times 100 = \frac{30}{30} \times 100 = 100\%$$

$$\begin{aligned}
 \text{Jadi Capaian Persentase} &= \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100 \\
 &= 23 / 89 \times 100 \\
 &\text{sebesar} = 25\%
 \end{aligned}$$

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu**

Bila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun lalu (2023) disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	
		Th. 2023	Th. 2024
3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan	100%	85.27%	67%
4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan	89%	100%	23%

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 sampai dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Perubahan Renstra 2019 - 2024) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 s.d. Akhir Tahun 2023**

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra (Th. 2024)	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. 2024	Tingkat Kemajuan
3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan	100%	85,27%	67%	
4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan	89%	100%	23%	

Pada IKU **“Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan”** Pada Tahun 2024 sebesar 67% artinya terjadinya penurunan dari tahun sebelumnya 2023 sebesar 85,27% .

**d. Alokasi per- Sasaran Pembangunan**

Untuk mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp. 28.029.846.738,- dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.12. Alokasi Per- Sasaran Pembangunan**

Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp.)	Prosentase Anggaran terhadap anggaran Perangkat Daerah
3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan	518.371.500	1,84%
4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan	1.999.800	0,007%

**e. Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

**Tabel 3.13. Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>PERSENTASE SARANA TRANSPORTASI DARAT YANG MEMENUHI STANDAR KESELAMATAN</b>	100%	67%	67%	<b>518.371.500</b>	<b>507.434,,364</b>	<b>97,89%</b>
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)						
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>94</b>	70	101	<b>518.371.500,00</b>	<b>507.434.364,00</b>	<b>97,89</b>
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	8500	6456	121	30.700.000,00	30.520.000,00	99,41
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8000	8000	100	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9	9	100	171.665.000,00	169.031.250,00	98,47
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12	12	100	116.006.500,00	107.883.114,00	93,00
<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>99</b>	<b>10.189.500,00</b>	<b>10.189.500,00</b>	<b>100,00</b>
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	15	15	100	10.189.500,00	10.189.500,00	100,00
<b>PROSENTASE ANGKUTAN LAUT YANG MEMENUHI STANDAR KESELAMATAN</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>	<b>1.999.800</b>	<b>1.575.000</b>	<b>78,75%</b>
Program Pengelolaan Pelayaran						
<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili DalamDaerah Kab /Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>75%</b>	<b>23 %</b>	<b>30%</b>	<b>1.999.800</b>	<b>1.575.000</b>	<b>78,75%</b>

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	52 kapal	23 Kapal	44,23%	1.999.800	1.575.000	78,75%
---	----------	----------	--------	-----------	-----------	--------

#### f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.14. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan	67%	97,89%	
4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan	2%	78,75%	

#### g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan dan Kegagalan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

**Tabel 3.15. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisa Penyebab
3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan	100%	67%	terkait dengan penegakan regulasi terhadap kendaraan bermotor Over Dimensi dan Overload (ODOL), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan	89%	23%	Operasi Pengawasan dan Penertiban Transportasi Laut sudah tidak dilakukan lagi dikarenakan daerah tidak memiliki kewenangan lagi sehingga Dishub mengganti kegiatan dengan mengadakan Pembinaan terhadap Nelayan/Pemilik kapal dibawah 7GT yang menghadiri Pembinaan sebanyak 30 orang sesuai dengan undangan Pembinaan sebanyak 30 orang.

**h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

**Tabel 3.16.**  
**Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan	100%	67%	<p>1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kegiatan :</p> <p>a. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>➤ Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>➤ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>➤ Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> </ul>
4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan	89%	23%	<p>1. Program Pengelolaan Pelayaran Kegiatan :</p> <p>a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota,</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>

### 3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.17. Realisasi Anggaran**

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	
<b><u>Sasaran :</u></b> Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan						
<b><u>Indikator Kinerja :</u></b> 1. Prosentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo						
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota</b>	16.685.286.895,00	16.559.861.001,00	99,25	
		Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten/Kota	295.022.000,00	291.703.776,00	98,88	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	950.829.306,00	923.742.130,00	97,15	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	15.439.435.589,00	15.344.415.095,00	99,38	
		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>238.838.100,00</b>	<b>235.980.084,00</b>	<b>98,80</b>	
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	238.838.100,00	235.980.084,00	98,80	
<b><u>Indikator Kinerja :</u></b> 2. Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo						
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>674.200.000,00</b>	<b>654.851.150,00</b>	<b>97,13</b>	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>674.200.000,00</b>	<b>654.851.150,00</b>	<b>97,13</b>	
		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>2.489.142.000</b>	<b>2.387.539.768</b>	<b>98,79</b>	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota	2.201.464.000,00	2.174.933.188,00	98,79	
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	4.500.000,00	4.275.000,00	95,00	
		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>1010</b>	
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	5.250.000,00	5.250.000,00	100	

	untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten/Kota			
	<b>Penetapan rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.450.000,00</b>	4.338.750,00	97,50
	Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.450.000,00	4.338.750,00	97,50
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>95,87</b>
	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1.275.000,00	1.210.000,00	94,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000,00	300.000,00	100

**Sasaran :**

Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan

**Indikator Kinerja :**

**3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan**

	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>518.371.500,00</b>	<b>507.434.364,00</b>	<b>97,89</b>
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	30.700.000,00	30.520.000,00	99,41
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	171.665.000,00	169.031.250,00	98,47
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	116.006.500,00	107.883.114,00	93,00

**Indikator Kinerja :**

**4. Prosentase Angkutan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan**

	Pengelolaan Pelayaran	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.999.800</b>	<b>1.575.000</b>	<b>79</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>1.999.800</b>	<b>1.575.000</b>	<b>79</b>
<b>TOTAL</b>			<b>20.338.099.995</b>	<b>20.158.623.037</b>	<b>99,11</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Probolinggo terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dapat disimpulkan bahwa rata-rata Indikator Kinerja Utama belum mencapai target untuk sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis (Review Renstra)

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	70%	82,79%	118%
		2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	20%	0%	0%
2	Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan	100%	67%	67%
		4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan	89%	23%	26%

#### 4.2 LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Langkah-langkah yang diambil Dinas Perhubungan Kota Probolinggo untuk meningkatkan Kinerja antara lain :

1. Komitmen yang kuat dari Pimpinan dalam Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Penguatan Tim Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Memonitoring setiap Triwulan tentang Pencapaian Kinerja;
4. Melakukan Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan;
5. Presentasi Laporan Kinerja tiap Eselon III dan Eselon IV;
6. Melakukan langkah-langkah perbaikan pencapaian kinerja; dan
7. Verifikasi Program dan Kegiatan.



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

## **DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO**

**TAHUN 2021-2024**  
**Penyesuaian Permendagri 90**

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

INSTANSI	<b>: DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO</b>
TUJUAN	: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur
Indikator Tujuan	: Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik
TUGAS	: Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perhubungan
FUNGSI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perhubungan.</li><li>2. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perhubungan;</li><li>3. Pelaksanaan Administrasi Dinas Daerah di Bidang Perhubungan;</li><li>4. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Daerah di Bidang Perhubungan; dan</li><li>5. Pelaksanaan Fungsi Dinas Lain Yang Diberikan Oleh Walikota Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya</li></ol>

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo  <i>Alasan :</i> Ditambah kata "dan Prasarana", karena mencakup seluruh fasilitas perlengkapan jalan baik non Elektrikal maupun Elektrikal	$f(x) = \frac{\sum \text{Ruas Jalan Kota (yg terpenuhi SarPras LLAJ + yg dilayani Angk Kota)}}{\sum \text{Seluruh Ruas Jalan Kota}} \times 100\%$ <p><b>Dengan :</b>  <math>f(x)</math> : Prosentase ruas jalan kota Probolinggo yang terpenuhi Sarana dan Prasarana LLAJ</p> $\sum \text{Ruas Jalan Kota (yg terpenuhi SarPras LLAJ + yg dilayani Angk Kota)}$ $\sum \text{Jumlah Ruas Jalan Kota yang terpenuhi Sarana dan Prasarana LLAJ Tahun berjalan/sekarang}$ $\sum \text{Seluruh Ruas Jalan Kota}$ $\sum \text{Jumlah Ruas jalan di Kota Probolinggo (SK Walikota terbaru)}$	Data Fasilitas Perlengkapan LLAJ	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sie Rekayasa Lalu Lintas dan Sie Pengelolaan Transportasi Elektrikal
		Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	$f(x) = \frac{\sum \text{pelanggaran AJ Th. n} - \sum \text{pelanggaran AJ Th. (n-1)}}{\sum \text{pelanggaran AJ Th. (n-1)}} \times 100\%$ <p><b>Dengan :</b>  <math>f(x)</math> : Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo</p> $\sum \text{pelanggaran AJ Th. n}$ $\sum \text{Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo Tahun berjalan/sekarang}$ $\sum \text{pelanggaran AJ Th. (n-1)}$ $\sum \text{Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo Tahun Kemarin}$	REKAPITULASI LAPORAN HASIL OPERASI GABUNGAN	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sie Manejemen Lalu lintas dan Pengendalian Operasional
2	Meningkatnya Kualitas Sarana Transportasi Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi standar keselamatan  <i>Alasan :</i> Formulasi diganti dengan jumlah Kendaraan Bermotor yang dilayani pada Pelayanan PKB guna terpenuhinya kendaraan laik jalan sesuai dengan standar keselamatan	$f(x) = \frac{\sum \text{Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala}}{\sum \text{Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji}} \times 100\%$ <p><b>Dengan :</b>  <math>f(x)</math> : Prosentase Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan laik jalan</p> $\sum \text{Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala}$ $\sum \text{Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala}$ $\sum \text{Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji}$ $\sum \text{Jumlah Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji}$	Data Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
		Prosentase Angkutan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	$f(x) = \frac{\sum \text{Kapal} < 7\text{GT} \text{ yang Memiliki Dok. Kapal (Th. n)}}{\sum \text{Kapal} < 7\text{GT} \text{ yang Tersedia Th. n}} \times 100\%$ <p><b>Dengan :</b></p> <p><math>f(x)</math> : Prosantase Angkutan Laut dibawah 7 GT yang Memenuhi Standar Keselamatan</p> <p><math>\sum \text{Kapal} &lt; 7\text{GT} \text{ yang Memiliki Dok. Kapal Th. n}</math>  Jumlah Kapal di Bawah 7GT yang Memiliki Dokumen Kapal Tahun berjalan/sekarang (selesai proses)</p> <p><math>\sum \text{Kapal} &lt; 7\text{GT} \text{ yang Tersedia Th. n}</math>  Jumlah Kapal di Bawah 7GT yang Ada di Kota Probolinggo Tahun berjalan/sekarang</p>	Data Kapal Pengurusan Surat Ukur sip dibawah 7 GT	Bidang Pengembangan Transportasi, Sie Perhubungan Laut